

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adjie, Habib, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2015, *Penafsiraan Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.
- , 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Andasasmita, Komar, 1981, *Notaris 1*, Sumur Bandung, Bandung.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewi, Santia dan R.M Fauwas Diradja, 2011, *Panduan Teori dan Praktik Notaris*, Pustaka Yustisia, Jakarta Selatan.
- Khairandy, Ridwan, 2014, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Kie, Tan Thong, 2009, *Studi Notariat dan serba-serbi Praktek Notaris*, Ictiar Baru van Hoeve, Bandung.
- Kohar. A, 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.
- Lumban Tobing, G.H.S, 1979, *Peraturan Jabtan Notaris Bagian 1*, Kelompok Belajar "ESA", Jakarta
- , 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.
- Makaraao, Mohammad Taufik, 2004, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Center for Documentation and Studies of Business Law (CDSBL), Yogyakarta.

- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia : Suatu Penjelasan*, Rajawali, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Rukmini, Mien, 2014, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (sebuah Bunga Rampai)*, PT. Alumni, Bandung
- Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subrata, Ganda , 1998, *Renungan Hukum*, IKAHI, Jakarta.
- Sudarsono, 1999, *Kamus Hukum Cetakan Kedua*, PT. Rineka cipta, Jakarta.
- Sumardjono, Maria SW, 2014, *Bahan kuliah Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutopo, Ariesto Hadi, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- T. Erwin, J. C. T. Simorangkir, Rudi, dan J.T Prasetyo, 1987, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta.
- Thoha, Miftha, 2005, *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.

#### **Jurnal dan Makalah:**

- Manggala, Dion Setya, “Tinjauan terhadap Perlindungan dan Jaminan Hukum kepada Notaris Akibat belum Sempurnanya Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris di Kota Yogyakarta”, “*Tesis*”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.
- Permata, Hertina Dinda, “Kedudukan Majelis Kehormatan Notaris terhadap Majelis Pengawas Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016”, “*Tesis*”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Tanjung, Afriansyah, “Tinjauan Yuridis Hak Retensi Sertifikat Atas Tanah oleh Notaris pada Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Suatu Hak Atas Tanah”, “*Tesis*”, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2018.

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 117, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379).

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, tambahan Lembar tahun 2014 Nomor 5491).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.HT.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

### **Kamus:**

Tim Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

### **Internet:**

Wikipedia, “Kalimantan Timur”, *id.wikipedia.org*,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan\\_Timur](https://id.wikipedia.org/wiki/Kalimantan_Timur), diakses pada hari Selasa  
tanggal 20 Maret 2018.

Ruth, Dhyah Madya, “Indonesia Notary Community, Wadah Bertanya Masalah Kenotariatan”, hukum Online Hukum.com,  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5795abd99c432/indonesia-notary-community--wadah-bertanya-masalah-kenotariatan>, 9 April 2018.